

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan dari berbagai sektor di Indonesia saat ini terus ditingkatkan. Salah satu sektor yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia adalah sektor konstruksi. Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi, banyak ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pembangunan konstruksi menjadi salah satu kontributor utama dari dampak negatif terhadap lingkungan, diantaranya berasal dari pengambilan material, proses pengolahan material, distribusi material, proses konstruksi, pengambilan lahan untuk bangunan serta konsumsi energi pada operasional bangunan

Dalam pembangunan nasional, sektor konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat sektor konstruksi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 7,84 % pada tahun 2021. Sektor konstruksi juga menghasilkan produk akhir berupa gedung, sipil atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu pembangunan sektor konstruksi bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah. (BPS, 2022)

Suatu proyek konstruksi dikatakan berhasil karena mampu memenuhi tujuan dari proyek tersebut yaitu, selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan, biaya

sesuai dengan yang disepakati, dan mutu atau kualitas proyek terpenuhi sesuai persyaratan yang disepakati. Untuk mampu mencapai tujuan itu diperlukan aturan-aturan dan perjanjian tertulis yang disebut kontrak konstruksi yang mengatur agar proses pencapaian tujuan itu terealisasi dengan baik.

Dengan adanya kontrak ini, kinerja pengendalian dan manajemen kualitas, biaya, dan terutama manajemen waktu yang diterapkan oleh kontraktor menjadi sangat berpengaruh karena kontrak kerja ini bersifat mengikat. Segala konsekuensi penerapan kontrak konstruksi bukan tidak mengandung risiko bagi kedua belah pihak, apalagi pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang banyak mengandung risiko dari aspek teknis yaitu desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Kontrak idealnya memuat perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini dikarenakan agar dalam pelaksanaannya memiliki batasan-batasan yang jelas dan menjadi sebuah pengaruh besar atau tantangan pihak pelaksana. Kontrak kerja juga dapat menjadi masalah apabila pihak pelaksana tidak memiliki manajemen yang jelas dalam pelaksanaan yang apabila terjadi kesalahan akan mempengaruhi perjanjian masa konstruksi serta pemeliharaan yang telah disepakati sebelumnya.

Apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan penyelewengan dari isi kontrak, maka permasalahan atau sengketa konstruksi (klaim) akan timbul di dalamnya. Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam industri jasa konstruksi, klaim sesungguhnya adalah suatu hal yang sangat wajar. Di Negara barat yang industri jasa konstruksinya sudah berkembang dengan para pelaku industri jasa konstruksi yang menyadari betul arti sebuah klaim, maka klaim menjadi suatu hal yang biasa.

Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak atas sesuatu, pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Klaim dalam proyek konstruksi memang sulit dihindari, untuk itu klaim dalam proyek konstruksi perlu diselesaikan dengan baik dan benar sehingga mendapat keputusan yang memuaskan untuk semua pihak

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul Tugas akhir Analisis Faktor Penyebab Klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa pada Proyek Bangunan Gedung Pemerintah di Kota Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang paling dominan penyebab klaim kontrak konstruksi pada Proyek Bangunan Gedung Pemerintah di Kota Jambi
2. Solusi Penyelesaian sengketa pada Proyek Bangunan Gedung Pemerintah di Kota Jambi

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diuraikan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa Faktor apakah yang paling dominan penyebab klaim kontrak konstruksi pada Proyek Bangunan Gedung Pemerintah di Kota Jambi
2. Bagaimana Solusi Penyelesaian sengketa pada Proyek Bangunan Gedung Pemerintah di Kota Jambi

1.4 Batasan Masalah

Agar lebih terarah pada permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini akan diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pengambilan data dilakukan dengan cara kuesioner kepada kontraktor Bangunan Gedung yang ada di kota Jambi dengan Kualifikasi Menengah Dan besar
2. Kontraktor yang di jadikan sampel adalah Data yang berasal dari BPS Provinsi Jambi, yaitu Data Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Jambi 2022
3. Pengolahan data analisa dilakukan dengan menggunakan software microsoft excell 2010.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi dan dapat menambah wawasan khususnya tentang Klaim dan sengketa pada pelaksanaan Konstruksi
2. Bagi kontraktor Bangunan Gedung sebagai evaluasi dengan memberikan masukan tentang Faktor apa saja menyebabkan klaim pada pelaksanaan Proyek Bagi kontraktor sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pelaksanaan proyek di waktu yang akan datang
3. Bagi konsultan sebagai masukan bagi konsultan perencana dalam melaksanakan perencanaan agar dapat di minimalkan kemungkinan terjadinya Klaim pada pelaksanaan konstruksi

4. Bagi Pembaca Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi mengenai klaim kontrak pada proyek konstruksi serta metode penyelesaian klaim kontrak

